

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Purwakarta menunjukkan dinamika inflasi dan harga barang yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Penilaian inflasi dilakukan melalui survei data harga barang dan jasa konsumsi masyarakat untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK). Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta nilai inflasi dihitung dengan mengumpulkan data harga yang kemudian diolah sehingga diperoleh nilai inflasi kabupaten dengan melihat nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH)

Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Purwakarta menggambarkan kondisi perkembangan harga pangan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Pada Periode Juli-September nilai IPH Kabupaten Purwakarta berfluktuatif. Periode Juli Kabupaten Purwakarta mengalami inflasi dan terjadi penurunan secara bertahap pada periode Agustus ke minggu-1 September yang kemudian kembali terjadi peningkatan dari minggu-1 September ke minggu-4 September 2025. Secara gambaran umum, nilai IPH Kabupaten Purwakarta dipengaruhi oleh beberapa komoditi dengan andil terbesar yaitu daging sapi, beras, bawang merah, cabai rawit. Proksi Inflasi ini menggunakan perubahan IPH khususnya untuk inflasi bahan pangan yang dihitung dari 20 komoditas yang paling tinggi dari data yang di laporkan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rata-rata harga cabe merah keriting di 3 Pasar UPTD Kabupaten Purwakarta pada bulan Agustus mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli sebesar Rp.2.118,- dengan harga rata-rata di bulan Juli Rp.37.548,- turun menjadi Rp.35.430, akan tetapi kembali mengalami kenaikan rata-rata harga di bulan September sebesar Rp.4.514,- dengan rata-rata harga menjadi Rp.39.944,-. Menurut Badan Pangan Nasional, kenaikan harga cabe merah keriting terjadi karena gangguan cuaca yang menyebabkan menurunnya produktivitas dan berkurangnya pasokan, selain itu beberapa petani juga melakukan peralihan usaha tanam dari cabai merah keriting ke jenis cabai lain (misalnya cabai rawit) sehingga pasokan cabe merah keriting menurun.

2. Rata-rata harga beras di 3 Pasar UPTD Kabupaten Purwakarta juga mengalami kenaikan pada bulan Agustus sebesar Rp.366,- dengan rata-rata harga pada bulan Juli sebesar Rp.12.634 menjadi Rp.13.000,- pada bulan Agustus dan relatif stabil pada bulan September. Menurut Badan Pangan Nasional, kenaikan rata-rata harga beras disebabkan oleh kenaikan harga gabah kering panen di tingkat produsen serta adanya penyesuaian HET beras untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen.

3. Rata-rata harga ayam potong ras di 3 Pasar UPTD Kabupaten Purwakarta pada bulan September mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus sebesar Rp.4.892,- dengan harga rata-rata di bulan Agustus Rp.32.086,- naik menjadi Rp.36.978,- di bulan September. Menurut

Badan Pangan Nasional, kenaikan harga daging ayam ras disebabkan karena menurunnya ketersediaan DOC yaitu anak ayam umur sangat muda, Jika DOC kurang maka populasi ayam masa panen pun ikut terpengaruh, sehingga pasokan daging ayam di pasar menjadi terbatas, selain itu kenaikan rata-rata harga juga disebabkan oleh adanya kenaikan biaya pakan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melaksanakan kegiatan Panen Holtikultura Agroforestri Gunung Hejo pada tanggal 05 Juli 2025.
2. Melaksanakan monitoring harga barang pokok dan penting pada 3 pasar UPTD Kabupaten Purwakarta.
3. Melaksanakan monitoring ketersediaan pasokan barang pada 3 pasar UPTD Kabupaten Purwakarta.
4. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada kegiatan Pelayanan Publik Terpadu
5. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten dan Kota Purwakarta pada tanggal 12 - 13 Juli 2025.
6. Melaksanakan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram bersubsidi kepada masyarakat pada kegiatan Pelayanan Publik Terpadu.
7. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Purwakarta, Pondoksalam dan Sukasari.
8. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah serentak dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan guna menyediakan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
9. Melaksanakan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Upaya Pengendalian Inflasi Daerah serta penyusunan *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2027 pada tanggal 23 Juli 2025.
10. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Bazar Usaha Mikro/Kecil pada tanggal 12 Agustus 2025 di Kantor Kejaksaan Purwakarta yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan.
11. Melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juni-Juli di Wilayah Kabupaten Purwakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu ndalam pemenuhan kebutuhan pokoknya pada tanggal 29 Juli 2025
12. Melaksanakan acara “Gelar Produk Pasar Pasisian Leuweung” dalam rangka pemberdayaan petani hutan Jawa Barat untuk memanfaatkan hasil hutan pada tanggal 26 Juli 2025.
13. Melaksanakan kegiatan Pasar Sasagaran pada tanggal 24 Agustus di Pasar Sasagaran Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperkuat ekonomi local.
14. Melakukan perbaikan jalan guna mendukung kelancaran distribusi untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Purwakarta.
15. Melaksanakan Panen Raya Padi KIM BROZEIN pada tanggal 20 Agustus 2025 di Kampung Tegal Junti Kelurahan Tegal Munjul seluas 2 hektar dalam rangka mendukung pemerintah pada Program Ketahanan Pangan Nasional.
16. Melaksanakan Panen Raya Padi dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional di Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus di Kp. Tegal Onder, Nagri Kidul.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang sudah berjalan agar dimaksimalkan dengan berkoordinasi lebih lanjut antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu melalui Dinas Pangan dan Pertanian, maupun tiap Kecamatan agar selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pelayanan Publik perlu dimaksimalkan melalui koordinasi dengan perangkat daerah agar dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Optimalisasi koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah agar lebih ditingkatkan terlebih pada saat kondisi inflasi yang tinggi di Kabupaten Purwakarta. Melalui penyusunan *Road Map* Pengendalian Inflasi 2025 - 2027 diharapkan program-program yang menekan laju inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan pemantauan harga secara langsung ke lapangan.
2. Tetap menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait seperti, instansi teknis dan distributor.
3. Optimalisasi terkait pemeliharaan jalan guna menjaga kelancaran distribusi.
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui gerakan menanam di halaman rumah masing-masing.
5. Memaksimalkan pelaksanaan 6 Upaya Konkrit Pemerintah Daerah dalam menangani inflasi daerah.